



# **PENGEMBANGAN STRUKTUR KEMITRAAN INDUSTRI SUSU USAHA KECIL MENENGAH MENUJU MASYARAKAT ASEAN 2015**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



2013

**PENGEMBANGAN STRUKTUR KEMITRAAN  
INDUSTRI SUSU USAHA KECIL MENENGAH  
MENUJU MASYARAKAT ASEAN 2015**

Penyusun:

Sjamsul Bahri  
Tjeppy D. Soedjana  
Budi Haryanto  
Subandriyo  
Atien Priyanti  
Bess Tiesnamurti



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2013**

# **PENGEMBANGAN STRUKTUR KEMITRAAN INDUSTRI SUSU USAHA KECIL MENENGAH MENUJU MASYARAKAT ASEAN 2015**

Hak Cipta ©2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan  
Jl. Raya Pajajaran Kav.E-59  
Bogor, 16151  
Telp. : (0251) 8322185  
Fax : (0251) 8328382; 8380588  
Email : [criansci@indo.net.id](mailto:criansci@indo.net.id)

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengembangan Struktur Kemitraan Industri Susu Usaha Kecil Menengah Menuju Masyarakat ASEAN 2015/Sjamsul Bahri; T.D. Soedjana; B. Haryanto; Subandriyo; A. Priyanti dan B. Tiesnamurti – Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2013: vi + 41 hlm; illus.; 16 x 20,5 cm.

ISBN 978-602-8475-73-0

1. Struktur Kemitraan    2. Industri Susu    3. Usaha Kecil Menengah  
I. Judul;                      II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;  
III. Bahri, S.

637:13



## KATA PENGANTAR

Susu merupakan komoditas strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Rantai tataniaga meliputi susu segar yang dihasilkan peternak, dikirim ke tempat pengumpulan susu, menuju koperasi dan sampai ke industri susu untuk diolah lebih lanjut. Pelaksanaan pola kemitraan yang bersifat parsial maupun komprehensif masih mengalami beberapa kendala, utamanya terkait dengan insentif harga. Penentuan harga susu yang atraktif perlu mendapatkan perhatian, sehingga jaminan usaha bagi peternak dan usaha kecil menengah yang menguntungkan secara ekonomi dapat dicapai. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menghadapi pasar tunggal terintegrasi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Usaha sapi perah di Indonesia sebagian besar didominasi oleh peternakan rakyat, dimana Pulau Jawa masih terus menjadi wilayah utama usaha sapi perah yang mencakup 99% dari produksi susu nasional pada tahun 2012. Di luar Pulau Jawa, jumlah populasi sapi perah yang terbanyak berada di wilayah Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang, Sinjai dan Sidrap), diikuti oleh Sumatera Utara (Medan, Deli Serdang, Langkat, Karo dan Simalungun) serta Sumatera Barat (Padangpanjang dan Pariaman). Pengembangan usaha sapi perah di luar Pulau Jawa harus terus didorong, seiring dengan promosi konsumsi berbasis susu segar melalui program pendidikan bagi anak usia sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan menugaskan Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner untuk menyelenggarakan *roundtable discussion* yang bertemakan 'Pengembangan Struktur Kemitraan Industri Susu Usaha Kecil Menengah Menuju Masyarakat ASEAN 2015'. Diskusi ini berlangsung pada tanggal 2 Mei 2013 di Bogor dengan melibatkan para pakar,

praktisi dan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta *stakeholders* terkait di bidang industri persusuan nasional. Hasil diskusi dirangkum dalam *booklet* ini agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait dengan saran dan rekomendasi tindak lanjutnya yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Semoga buku ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Bogor, Juni 2013

Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Pertanian



**Dr. Ir. Haryono, MSc**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Pendahuluan.....	1
Tahapan Kegiatan.....	3
Sasaran dan Tujuan.....	5
Sasaran.....	5
Tujuan.....	5
Potensi Usaha Sapi Perah Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.....	6
Daya Saing Industri Susu Skala UKM Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.....	9
Strategi dan Peluang Pengembangan Model Kemitraan Skala UKM.....	13
Landasan Hukum Cetak Biru Persusuan Indonesia 2025.....	16
Langkah Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan.....	18
Matriks Rencana Tindak Pengembangan Struktur Kemitraan Industri Susu Usaha Kecil Menengah Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.....	23
Daftar Bacaan.....	25
Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner.....	27
Tim Perumus.....	28
Lampiran.....	29

Arah dan Strategi Kebijakan Persusuan Indonesia 2025.....	31
Program Pemerintah dalam Mengakselerasi Peningkatan Produksi Susu Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN 2015.....	33
Membangun Kemitraan Peternak Sapi Perah dengan Industri Pengolahan Susu.....	35
Peningkatan Kualitas Susu Segar untuk Menghasilkan Produk Berdayasaing dan Pendapatan yang Atraktif.....	37
Strategi Pemasaran dan Daya Saing Produk Susu Segar Dalam Negeri Menuju AEC 2015.....	39

## PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 yang tidak hanya terbatas mewujudkan suatu pasar tunggal yang terintegrasi, melainkan juga harus meningkatkan daya saing ASEAN di pasar dunia. Hal ini dapat dipandang merupakan suatu ancaman bagi produk di dalam negeri, namun juga suatu peluang yang dapat meningkatkan nilai ekspor tanpa hambatan. Susu merupakan komoditas strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Hal ini memposisikan susu sebagai barang yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai sehingga diharapkan dapat mempertahankan daya saing, khususnya pada industri hilir. Industri persusuan nasional memiliki *stakeholders* yang cukup banyak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dukungan instansi pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi persusuan nasional sudah cukup banyak yang terdiri dari dukungan pada aspek hulu, *on farm*, dan hilir, serta aspek pendukung untuk permodalan, iptek, regulasi dan transportasi. Kementerian dan kelembagaan terkait lainnya yang memiliki wewenang (kontribusi) dalam program persusuan nasional disamping Kementerian Pertanian adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan dan Kebudayaan, Dalam Negeri, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Kehutanan, Riset dan Teknologi, Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dukungan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) juga tidak kalah pentingnya, demikian pula dengan *stakeholders* lain seperti Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Industri Pengolah Susu (IPS) dan kelompok peternak.

Rantai tata niaga susu segar dengan pasar IPS diawali dengan produk susu yang dihasilkan oleh peternak, dikirim ke tempat pengumpulan susu, menuju koperasi susu dan diangkut menuju IPS.



## TAHAPAN KEGIATAN

Memperhatikan hal tersebut diatas, dalam rangka menyongsong pasar tunggal ASEAN 2015 dan menciptakan daya saing industri persusuan yang kondusif, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan menugaskan Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner untuk menyelenggarakan *Roundtable Discussion* (RTD) bertemakan "Kajian Pengembangan Struktur Kemitraan Industri Susu Usaha Kecil Menengah Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015". Acara ini berlangsung di Bogor pada tanggal 2 Mei 2013 yang bertujuan untuk memperoleh berbagai pandangan dan masukan dalam upaya meningkatkan insentif harga jual susu di tingkat peternak dalam suatu struktur yang berkelanjutan antara peternak dengan UKM. Keluaran yang diharapkan meliputi berbagai informasi penting berkaitan dengan insentif harga susu di tingkat peternak sebagai faktor penentu dalam membangun struktur kemitraan industri susu UKM, serta saran dan rekomendasi untuk percepatan dan perluasan kemitraan industri susu skala UKM. Diharapkan hasil diskusi dapat memberikan opsi kebijakan terhadap perluasan struktur kemitraan industri susu yang dapat memberikan insentif harga di tingkat peternak.

Narasumber kegiatan ini meliputi:

1. Asisten Deputi Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Deputi Pangan, Kemenko Bidang Perekonomian, dengan topik bahasan "Arah dan strategi kebijakan persusuan Indonesia 2012–2025".
2. Asisten Deputi Urusan Perikanan dan Peternakan, Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, dengan topik bahasan "Program Pemerintah dalam mengakselerasi peningkatan produksi susu menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015".
3. Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia, dengan topik bahasan "Membangun kemitraan peternak sapi perah dengan industri pengolahan susu".
4. Kepala Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak, Cikole–Lembang, dengan topik bahasan "Peningkatan kualitas susu segar untuk menghasilkan produk berkualitas dan pendapatan yang atraktif".
5. Ir. Thomas Darmawan, Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman dan Tembakau, KADIN Indonesia dengan topik bahasan "Strategi pemasaran dan daya saing produk susu segar dalam negeri menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015".

Diskusi ini dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai instansi terkait seperti lingkup Kementerian Pertanian (Ditjen P2HP, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan), Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Perdagangan, Asosiasi, Dinas Peternakan Daerah (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sinjai), praktisi usaha sapi perah di wilayah DKI, dan peneliti lingkup Badan Litbang Pertanian.

## **SASARAN DAN TUJUAN**

### **SASARAN**

Sasaran yang diharapkan dari diskusi ini adalah terimplementasikannya rekomendasi tentang menciptakan struktur kemitraan industri susu skala kecil menengah dalam rangka menyongsong pasar tunggal dalam MEA 2015. Diharapkan usaha ini dapat memberikan insentif harga yang layak bagi peternak sapi perah sehingga dapat meningkatkan motivasi usaha yang lebih berdayasaing.

### **TUJUAN**

Tujuan penyelenggaraan RTD ini adalah untuk mensintesis dan menganalisis alternatif/opsi kebijakan terkait dengan struktur kemitraan industri susu skala kecil menengah dalam rangka menyongsong pasar tunggal dalam MEA 2015. Kegiatan ini juga akan mengidentifikasi beberapa instrumen kebijakan yang dapat diterapkan dari aspek pemasaran dan kelembagaan koperasi susu terkait dengan usaha, kecil dan menengah.

## **POTENSI USAHA SAPI PERAH MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

Usaha sapi perah di Indonesia sebagian besar didominasi oleh peternakan rakyat, dimana Pulau Jawa masih terus menjadi wilayah utama usaha sapi perah yang mencakup 99% dari produksi susu nasional (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012). Peternak ini telah menghasilkan 622 ribu ton susu pada tahun 2012, naik dari 374 ribu ton pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 8% per tahun. Jumlah rumahtangga peternak sapi perah di Pulau Jawa mencapai 115.452 yang merupakan 97% total rumahtangga peternak sapi perah di Indonesia (Ditjen Peternakan, 2010). Sapi-sapi perah yang terdapat di Pulau Jawa tersebar di daerah-daerah Jawa Timur (49,6%), Jawa Tengah (25%), Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (24%), serta DI Yogyakarta (0,6%). Sapi perah yang terdapat di daerah Jawa Timur terutama terkonsentrasi di daerah Pasuruan, Nongkojajar, Batu, Pujon, dan Malang. Sementara untuk Jawa Tengah berada di wilayah-wilayah Semarang, Boyolali, Ungaran, Salatiga, Solo, dan Ambarawa, sedangkan untuk Jawa Barat terutama terkonsentrasi di daerah Pangalengan, Lembang, Ujung Berung, Garut, Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Di luar Pulau Jawa, jumlah populasi sapi perah yang terbanyak berada di wilayah Sulawesi Selatan (36%), diikuti oleh Sumatera Utara (17,5%) dan Sumatra Barat (11%). Populasi sapi perah di Sulawesi Selatan terkonsentrasi di wilayah-wilayah Enrekang, Sinjai dan Sidrap, sedangkan hal tersebut di Sumatera Utara meliputi Medan, Deli Serdang, Langkat, Karo dan Simalungun, serta Padangpanjang dan Pariaman di Sumatera Barat.

Keadaan ini menunjukkan bahwa kecenderungan pengembangan sapi perah sudah mulai mengarah di luar Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh potensi daya dukung ruang produksi yang sangat mendukung karena selain masih tersedianya lahan yang luas juga potensi sumber daya pakan yang sangat besar. Sumber daya ini



belum dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber pakan, terutama untuk penyediaan hijauan pakan dan bahan konsentrat yang berasal dari hasil samping usaha perkebunan dan tanaman pangan. Persoalan mendasar yang menjadi kendala pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa adalah infrastruktur fisik (sarana dan parsarana) serta kelembagaan yang belum memadai karena kultur sumber daya manusia yang belum berpengalaman dalam manajemen budidaya ternak sapi perah.

Koperasi merupakan salah satu kelembagaan yang memiliki peranan penting dalam tataniaga industri susu nasional. Koperasi ini dibedakan atas koperasi primer yang terdiri dari koperasi persusuan atau koperasi yang bergerak di bidang persusuan (koperasi *single purpose* dan KUD Unit Susu), serta koperasi sekunder yaitu gabungan dari koperasi primer dalam GKSI. Jumlah peternak anggota koperasi primer saat ini mencapai 127 ribu orang yang tergabung dalam 1500 kelompok ternak. Jumlah koperasi primer anggota GKSI daerah mencapai 95 koperasi, yang terdiri masing-masing sejumlah 22 koperasi, 23 koperasi dan 50 koperasi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Populasi sapi perah milik anggota mencapai 375 ribu ekor dengan total produksi per hari sekitar 1,5 – 1,6 juta liter, dimana baru dapat memenuhi 22% kebutuhan dalam negeri. Aset yang dimiliki peternak dan koperasi meliputi *cooling unit* (351 buah), truk sebagai transfer tank (375 buah), kendaraan daerah dan pemasaran (450 unit), pabrik pakan konsentrat (85 buah), dan 3 buah pabrik susu, masing-masing di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pabrik susu milik GKSI memiliki kapasitas produksi berturut-turut sebesar 100 ton/hari, 200 ton/hari dan 250 ton/hari untuk pabrik di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (GKSI, 2013). Oleh karenanya, GKSI merupakan kelembagaan yang sangat berperan dalam pengembangan agribisnis sapi perah di Indonesia dengan salah satu fungsinya adalah menegosiasikan harga beli susu segar dengan IPS.

Secara ringkas disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk dapat menjadi salah satu pemasok susu segar menuju MEA 2015, dengan negara pesaing utama adalah Thailand. Hal ini berdasarkan atas beberapa indikator, meliputi:

- a) Prioritas sektor integrasi dalam MEA yang menempatkan produk agribisnis sebagai andalan utama dengan konsumen mencapai sekitar 600 juta orang dan lebih dari 25% merupakan konsumen kelas menengah;
- b) Populasi sapi perah mencapai 622 ribu ekor, dengan potensi kelahiran sebesar 140 ribu ekor/tahun, atau sekitar 70 ribu ekor sebagai sumber calon sapi induk laktasi setiap tahun;
- c) Produksi susu mencapai 1,4 – 1,5 juta liter/hari;
- d) Jumlah peternak yang tergabung dalam koperasi mencapai 127 ribu orang dengan sekitar 1500 kelompok ternak;
- e) Terdapat sekitar 95 koperasi primer di wilayah Pulau Jawa dan tergabung dalam 3 koperasi sekunder (masing-masing GKSI Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur) dan menjadi anggota GKSI Nasional; dan
- f) Letak geografis Indonesia dengan dukungan program pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa (utamanya Sumatera), yang mendekati pasar MEA melalui industri pengolahan susu skala UKM yang memenuhi standar kualitas regional.

## **DAYA SAING INDUSTRI SUSU SKALA UKM MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

Membangun era baru menuju MEA 2015 sudah disepakati dalam kesepakatan *Blue Print ASEAN Community* yang berlandaskan pada 4 azas utama, yakni: (i) Pasar tunggal dan basis produksi regional, (ii) Kawasan yang memiliki daya saing tinggi, (iii) Kesamaan dalam pembangunan ekonomi yang merata, dan (iv) Integrasi perekonomian kawasan dengan perekonomian global (ASEAN *Economic Community Blueprint*, 2008). Hampir 600 juta penduduk ASEAN sebagai pasar dunia, suatu potensial pasar yang sangat besar. Lebih dari 30% merupakan penduduk dengan pendapatan kelas ekonomi menengah atas dengan berbagai perbedaan pangsa pasar dan kultur sosial budaya. Negara-negara di wilayah ASEAN merupakan *net importir* pangan seperti terigu, daging, ikan, tepung ikan, buah, kapas, dan produk susu. Namun di sisi lain, wilayah ini merupakan eksportir global untuk produk-produk sawit, kopi, udang, coklat, karet, nanas, pisang dan produk pertambangan.

Hampir 50% penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta ( $\approx$  57 juta rumah tangga) memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 850 ribu – Rp. 2,3 juta per rumah tangga. Sekitar 41% berada dibawah Rp. 850 ribu/bulan dan sejumlah 12% berada diatas Rp. 2,3 juta/bulan (Darmawan, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa potensi penduduk kelas ekonomi menengah atas cukup besar di Indonesia, dan sudah sepantasnya memberikan peluang usaha yang sangat prospektif, termasuk industri pengolahan berbasis susu segar. Konsumsi susu nasional diprediksi meningkat sebesar 8% pada tahun 2013, dimana hal ini dipicu oleh kenaikan jumlah penduduk dan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang manfaat susu bagi kesehatan. Variasi minuman susu oleh produsen dalam berbagai bentuk seperti susu siap minum juga turut mendorong kenaikan konsumsi susu.



Model pengembangan usaha persusuan skala UKM seyogyanya berbasis proses pengolahan, karena selain dapat meningkatkan nilai tambah juga akan menambah saluran pemasaran di sentra-sentra produksi susu. Proses pengadaan pasokan bahan baku susu segar diperoleh langsung dari peternak melalui kelompoknya, sehingga rantai pasokan menjadi lebih pendek dan efisien. Suatu usaha pengolahan skala UKM berbasis susu segar telah dibangun sejak tahun 2005 di wilayah Bogor dengan nama PT. Cimory yang dapat melihat peluang usaha untuk berkecimpung di industri persusuan. Produk utama yang dihasilkan berupa susu segar dengan kualitas premium, sehingga mampu membeli harga jual susu di tingkat peternak yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan jika susu tersebut dibeli oleh IPS. Kualitas susu, utamanya untuk TPC dan *total solid*, menjadi syarat utama sebagai basis pembayaran. Rata-rata harga beli di tingkat peternak adalah 10% lebih mahal, dan susu segar ini dapat langsung dikirim ke PT. Cimory tanpa harus melalui koperasi dalam rangka meminimalkan jumlah bakteri yang terjadi selama transportasi. Hal ini sudah melalui tahapan evaluasi dalam jangka waktu yang cukup lama melalui pendampingan teknis. Harga beli di tingkat peternak yang tinggi diyakini dapat menjadi pemicu untuk menghasilkan susu segar yang berkualitas, sehingga dengan meningkatkan pendapatan peternak melalui harga beli susu yang tinggi, akan mengakibatkan kenaikan jumlah produksi susu berkualitas di tingkat peternak. Kapasitas produksi yang dihasilkan oleh PT. Cimory mencapai 15 ton/hari, meningkat dari sekitar 2,5 ton/hari di tahun 2006. Hal ini memberikan dampak terhadap peningkatan populasi sapi perah di KUD Giri Tani sebagai mitra PT. Cimory dari sekitar 1500 ekor pada tahun 2006 menjadi 4200 ekor di tahun 2012. Berkembangnya usaha sapi perah di KUD ini dikarenakan harga jual susu yang cukup tinggi dan menguntungkan peternak. Saat ini, PT. Cimory telah melakukan ekspansi usahanya di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan mengadopsi struktur kemitraan yang ada di wilayah Bogor. Usaha yang dibangun oleh PT. Cimory ini akan mampu meningkatkan populasi sapi perah



nasional secara signifikan apabila model seperti ini dapat diperluas atau direplikasi dengan dukungan pemerintah (Cimory, 2012).

Skala usaha yang optimal merupakan salah satu faktor dalam rangka meningkatkan daya saing usaha sapi perah. Dengan skala usaha yang relatif rendah, peternak sapi perah belum dapat mengandalkan kehidupannya pada usaha ini. Kondisi skala usaha yang belum ekonomis ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya modal peternak dan kesulitan mencari pakan hijauan karena terbatasnya lahan untuk tanaman pakan ternak sehingga penyediaan jumlah dan kualitas pakan juga terbatas. Beberapa kajian terdahulu melaporkan bahwa untuk mencapai skala usaha yang optimal, setiap peternak harus memelihara lebih dari enam ekor induk dalam satu tahun, bahkan diperkirakan skala ekonomis dapat dicapai dengan kepemilikan 10 – 12 ekor sapi per peternak. Hal ini tentu saja sangat tergantung dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki peternak, yaitu lahan, tenaga kerja dan modal. Komposisi ternak produktif dan non produktif juga merupakan faktor yang harus diperhatikan pada usaha pemeliharaan sapi perah, dimana komposisi ini terdiri dari 85% ternak produktif dan 15% ternak non produktif. Perbandingan sapi laktasi yang efisien adalah 4:3, artinya bahwa apabila jumlah sapi yang dipelihara 7 ekor, harus terdiri dari empat ekor sapi laktasi, satu ekor sapi kering dan dua ekor pedet. Lebih lanjut dilaporkan bahwa usaha sapi perah sebagai penghasil bahan baku IPS yang memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif adalah dengan skala pemilikan lebih dari 3 UT atau rata-rata 5,23 UT dan proporsi sapi laktasi lebih dari 70% (Priyanti *et al*, dalam Santosa *et al*, 2009).

Efisiensi produksi dan biaya produk susu segar menjadi kunci utama dalam mencapai industri susu yang berdayasaing. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan kinerjanya meliputi:

- a) Peningkatan manajemen pemeliharaan sapi di tingkat peternak mulai dari kebersihan sapi dan kandang, kualitas

pakan, teknik pemerahan yang benar dan higienis, serta perlakuan pasca pemerahan;

- b) Mengoptimalkan usaha sapi perah mencapai skala usaha yang ekonomis melalui penyediaan dan kemudahan akses kepada modal kerja maupun investasi, pakan hijauan dan konsentrat; Peningkatan kualitas susu segar sesuai SNI seperti kadar lemak, kadar protein dan kandungan bakteri yang dilakukan secara komplementer melalui insentif harga;
- c) Kualitas susu yang baik harus dibarengi dengan sistem pengawasan kualitas yang sangat ketat dan didukung oleh penyediaan alat-alat yang terstandarisasi sesuai kebutuhan;
- d) Industri susu skala UKM harus terus didorong untuk mencapai kondisi yang diharapkan secara bertahap melalui: (i) Pelatihan dan penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan, (ii) Penerapan cara produksi susu yang baik, (iii) Penerapan manajemen keamanan pangan berdasarkan prinsip HACCP, dan (iv) Pelaksanaan sertifikasi manajemen mutu internasional (ISO 9000, 22000, SQF); dan

Prinsip-prinsip *good farming practices, good handling practices, good distribution practices, good retailing practices*, dan *good consumption practices* harus diterapkan dengan baik dan benar, sebagai satu kesatuan sistem manajemen *from farm to table*.

## STRATEGI DAN PELUANG PENGEMBANGAN MODEL KEMITRAAN SKALA UKM

UKM memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional yang ditengarai sebagai mayoritas jumlah pelaku usaha (55,2 juta unit usaha  $\approx$  99,9%), penyerap tenaga kerja terbanyak (101,7 juta pekerja  $\approx$  97,24%), kontribusi terhadap PDB sebesar Rp. 3,4 Trilyun/tahun ( $\approx$  57,1%), dan memiliki nilai investasi sebesar Rp. 927 Trilyun (44,89%). Dalam rangka mempermudah akses permodalan untuk pengembangan Koperasi dan UMKM (K-UMKM), Kementerian Koperasi dan UKM memiliki peran untuk: (i) Membuka akses pendanaan, (ii) Memperluas sumber-sumber pendanaan, dan (iii) Melaksanakan perumusan kebijakan (regulasi) dalam pengendalian pengawasan koperasi simpan pinjam.

Terdapat 4 jenis usaha di Indonesia, yakni usaha mikro, kecil, menengah dan besar, dimana sebagian besar usaha yang ada di Indonesia adalah usaha mikro dan berjumlah sekitar 54,55 juta unit (98,85%). Usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih < Rp. 50 juta dengan hasil penjualan < Rp. 300 juta. Usaha kecil, menengah dan besar, masing-masing berjumlah 602 ribu (1%), 44 ribu (0,08%) dan 4,95 ribu (0,01%). Kekayaan bersih dan hasil penjualan per tahun untuk kriteria usaha kecil, menengah dan besar berturut-turut adalah > Rp. 50 juta – 500 juta dengan hasil penjualan > Rp. 300 juta – Rp. 2,5 Milyar; Rp. 500 juta – Rp. 1 Milyar dengan hasil penjualan > Rp. 2,5 Milyar – Rp. 50 Milyar; dan > Rp. 10 Milyar dengan hasil penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun. Untuk saat ini, sekitar 70% usaha mikro masih belum layak usaha dan belum *bankable*, baru 30% sudah layak usaha dan belum *bankable*. Sedangkan, sebagian besar usaha kecil dan usaha menengah sudah layak usaha dan bankable, masing-masing sebesar 60% dan 90%. Baru sekitar 10% usaha besar yang layak *go public*.



Sumber pembiayaan K-UMKM dapat berasal dari pemerintah, non pemerintah serta gabungan dari pemerintah dan non pemerintah. Sumber pemerintah terdiri dari dana APBN, APBD dan SUP-005. Sumber non pemerintah dapat berasal dari bank maupun non bank dengan berbagai jenis kredit, sedangkan sumber gabungan dari pemerintah dan non pemerintah dapat berasal dari laba BUMN. Target atau sasaran dari sumber-sumber pembiayaan ini adalah K-UMKM baik yang belum *bankable* maupun yang sudah *bankable*. Program strategis tahun 2013 dari Kementerian Koperasi dan UKM meliputi belanja sosial bantuan perkuatan permodalan bagi pelaku usaha mikro dan wirausaha pemula. Hal ini terdiri dari penyediaan modal bagi pelaku usaha mikro dan perempuan pelaku usaha mikro melalui koperasi pedesaan dan perkotaan, serta wirausaha pemula yang ditujukan bagi penguatan dan pengembangan bantuan dana untuk masyarakat dengan status hibah sebagai modal awal ataupun tambahan modal.

UKM dapat memanfaatkan kerjasama produksi dalam bentuk *contract manufacturing* dengan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh seperti jaminan kebutuhan investasi, kapasitas produksi, biaya promosi dan pemasaran yang lebih efisien. Agar peternak dapat mandiri dan tidak tergantung kepada IPS, dianjurkan beberapa koperasi bergabung untuk dapat membuat pabrik pengolahan susu skala menengah berbasis susu segar di sentra-sentra produksi susu. Produk yang disarankan adalah dalam bentuk UHT dengan kemasan *soft pack* (tiga layer) dimana kualitas susu dapat bertahan sampai 5 bulan. *Captive market* dengan dukungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan pasar utama dengan target yang semakin menurun dalam kurun waktu tertentu. Pembangunan pabrik pengolahan susu skala UKM di dekat sentra produksi dapat menghemat biaya produksi, sehingga memiliki daya saing tinggi. Apabila pabrik ini juga dekat dengan konsumen dan jumlah permintaan dapat diestimasi dengan baik, maka dapat didorong untuk pembangunan pabrik pengolahan susu pasteurisasi skala UKM.



Susu pasteurisasi adalah produk susu kualitas yang terbaik untuk konsumen, dan bantuan pemerintah untuk pembangunan pabrik pengolahan susu ini sangat diharapkan, namun pengelolaan susu dari peternak sampai pabrik harus dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan.

## **LANDASAN HUKUM CETAK BIRU PERSUSUAN INDONESIA 2025**

Program pengembangan persusuan telah dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dengan rencana peluncuran Cetak Biru Persusuan Indonesia 2012 – 2025 pada Hari Susu Nusantara, 1 Juni 2013 di Kota Padang. Diharapkan hal ini dapat menjadi acuan seluruh *stakeholders* baik pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dan asosiasi, dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta dapat memberikan kepastian industri susu skala UKM dalam mengembangkan usahanya dengan bahan baku lokal secara berkelanjutan.

Pembangunan persusuan di Indonesia sangat penting karena perannya yang sangat signifikan dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia bangsa. Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar Pemerintah Indonesia harus mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya adalah melalui konsumsi susu karena kekurangan protein hewani dapat berakibat fatal bagi perkembangan otak manusia. Kehilangan kesempatan dalam mengkonsumsi protein hewani yang cukup utamanya pada usia balita tidak dapat digantikan dengan yang lainnya saat usia dewasa. Jika hal ini terjadi, maka dapat berakibat pada hilangnya satu generasi (*loss generation*) pada masa yang akan datang.

Cetak Biru Persusuan Indonesia 2025 disusun atas dasar konsep bersama yang terdiri dari *Blue Print* Persusuan Kementerian Pertanian 2010, *Roadmap* Klaster Industri Susu Olahan Kementerian Perindustrian 2030, *Position Paper* Kementerian Perdagangan, dan *Roadmap* Kementerian Koperasi dan UMKM. Hal ini dibangun sebagai dasar koordinasi penyusunan perencanaan kebijakan nasional di bidang persusuan, disamping sebagai acuan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan penyusunan Cetak Biru

Persusuan Indonesia 2025, di antaranya adalah (Kemenko Bidang Perekonomian, 2013):

- a) Mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan yang lebih terfokus dan terpadu lintas sektoral dari hulu sampai hilir;
- b) Memberikan target dan tahapan pencapaian yang komprehensif sebagai indikator keberhasilan;
- c) Memberikan acuan penyediaan input yang diperlukan dan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan;
- d) Memberikan kepastian usaha kepada peternak dalam mengelola usaha ternak perah yang meliputi sapi perah FH dan non FH, serta non sapi perah (kerbau, kambing dan kuda) secara berkelanjutan dan terintegrasi; dan
- e) Memberikan kepastian industri pengolah susu dalam mengembangkan usahanya berdasarkan bahan baku lokal yang berkelanjutan.

Tahapan Cetak Biru Persusuan Indonesia 2025 adalah: Fase I yang merupakan tahapan persiapan dan pematapan (2013–2014), Fase II adalah tahapan pengembangan persusuan nasional maju (2015–2020), dan Fase III sebagai tahapan persusuan nasional tangguh dan berdaulat (2020–2025). Keberadaan Cetak Biru Persusuan ini bukan hanya rencana dari pemerintah, tetapi juga merupakan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah maupun pelaku usaha. Oleh sebab itu, dalam implementasinya memerlukan dukungan penuh dari pimpinan pemerintahan dan pelaku usaha, membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh serta didukung oleh sumber daya yang memadai.

## **LANGKAH TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Hasil pemaparan nara sumber dan diskusi memberikan beberapa alternatif/opsi rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi langkah tindak lanjut berikutnya. Hal ini meliputi:

1. Bahwa dalam menyongsong MEA 2015, sudah sewajarnya Indonesia harus mampu menguasai pasar karena 65 persen dari total konsumsi ada di Indonesia. Terdapat 7 sektor barang dan 5 sektor jasa dalam MEA 2015 dengan industri berbasis pertanian sebagai prioritas pasar integrasi. Mempertimbangkan potensi yang dimiliki dalam usaha sapi perah (populasi, produksi, jumlah peternak dan koperasi susu, serta letak geografis), Indonesia memiliki peluang untuk dapat menjadi salah satu pemasok produk susu segar menuju MEA 2015, dengan negara pesaing utama adalah Thailand.
2. Produksi susu segar dalam negeri masih harus ditingkatkan karena dewasa ini baru mampu memenuhi sekitar 22% dari kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hal ini memberikan peluang besar untuk mengembangkan usaha ternak sapi perah melalui peningkatan populasi dan produktivitas, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Peluang ini juga sudah menjadi pertimbangan beberapa negara di Timur Tengah yang berminat untuk membangun pabrik susu di Pulau Jawa.
3. Pemasaran susu segar dalam negeri memerlukan kelembagaan yang terintegrasi dari peternak sebagai produsen susu, koperasi dan IPS sampai pada konsumen untuk menjamin keberlangsungan usaha ternak sapi perah.
4. Informasi yang berkaitan dengan kenyataan bahwa sebagian besar nilai produk susu (80%) merupakan nilai biaya yang



digunakan untuk selain dari nilai susu (*other than farm value*), perlu disosialisasikan kepada para produsen skala UKM serta konsumen, sehingga kesadaran tentang pentingnya biaya untuk kemasan dapat menjadi perhatian.

5. Harga susu di tingkat peternak merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi. Harga susu yang berlaku hingga saat ini dirasakan terlalu rendah sehingga sulit bagi peternak untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang wajar dimana sebagian besar proporsi biaya produksi susu adalah untuk pakan, yang mencapai sekitar 80% dari total biaya produksi. Sementara itu, masalah pakan perlu mendapatkan perhatian agar jaminan ketersediaan dan kualitasnya dapat menunjang produksi susu yang tinggi.
6. Berdasarkan pengalaman tahun 2008 pada saat harga susu dunia sangat tinggi, IPS berlomba-lomba menyerap seluruh SSDN, untuk semua kualitas, karena harganya dipandang jauh lebih murah. Langkah tersebut menjustifikasi bahwa sebenarnya SSDN dengan beragam kualitas, dapat diproses menjadi produk susu oleh IPS dan tetap dapat dipasarkan.
7. Perlu adanya transparansi dalam penilaian kualitas susu dari peternak maupun koperasi yang dimasukkan ke IPS, sehingga penentuan harga dapat menguntungkan peternak yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas susu dari ternak yang diusahakannya. Transparansi penilaian kualitas susu dapat diterapkan lebih lanjut kepada penilaian susu (segar dan bubuk) berdasarkan kandungan nutrisinya sebagai dasar penentuan harga. Dengan demikian, bahan baku susu (impor) yang tidak lagi mengandung lemak susu, dan kemudian di *reconstitute* menjadi susu cair dengan menambahkan lemak nabati, tidak lebih baik (harganya lebih murah) dibanding SSDN yang masih mengandung lemak susu asli. Pendekatan ini dapat dijadikan penjelasan bahwa SSDN



nilai nutrisinya lebih baik, dan harus diberi harga yang lebih tinggi.

8. Keberpihakan pemerintah kepada peternak sapi perah di dalam negeri dapat pula dilakukan melalui kebijakan serupa kepada komoditas lain, seperti saat ini sudah dilakukan program subsidi pakan untuk sapi perah. Kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan bea masuk yang seharusnya lebih tinggi dari yang sekarang diberlakukan (5%) untuk menstimulasi industri susu dalam negeri.
9. Berkaitan dengan struktur kemitraan, dari pihak peternak (koperasi) disarankan untuk meningkatkan produksi susu melalui pola 100–100–1.000–10.000; yaitu pengembangan kawasan peternakan sapi perah dengan unit luasan 100 ha untuk 100 orang peternak dengan skala pemilikan 10 ekor/peternak dan produktivitas ternak 10 liter/ekor/hari sehingga diperoleh produksi susu 10.000 liter/hari.
10. Pengembangan usaha ternak sapi perah di luar Pulau Jawa masih memerlukan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar dapat memelihara ternak sapi perah dengan benar dan sehat (*good farming practice*). Untuk itu, pendampingan teknologi dan bantuan teknis masih diperlukan.
11. Upaya peningkatan keterampilan peternak sapi perah dalam bidang manajemen ternak dan hijauan pakan ternak dapat dilakukan bekerjasama dengan Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak (BPTSP–HMT) Cikole, Lembang Jawa Barat.

12. Diversifikasi produk olahan susu perlu dilakukan untuk memberikan variasi pilihan produk susu bagi konsumen. Produsen produk susu dan olahannya yang berskala UKM dapat melakukan produksi tanpa harus memiliki segala fasilitas produksi dan pengolahan sendiri.
13. Pengembangan konsumen susu segar dalam negeri melalui program minum susu bagi anak sekolah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan serapan produksi SSDN oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa. Oleh karena itu, program minum susu bagi anak sekolah perlu digalakkan dengan komitmen yang tinggi antara Kementerian Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Keuangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian.
14. Promosi untuk meningkatkan konsumsi SSDN oleh masyarakat harus dilakukan bersamaan (simultan) dengan upaya pemecahan masalah yang lain. Kampanye minum susu berbasis SSDN perlu terus didorong sehingga dapat menciptakan pasar tersendiri. Melalui perkembangan pemasaran yang berkesinambungan, diyakini ekspansi industri pengolahan susu skala UKM dapat berkembang dengan konsep model kemitraan yang selama ini berlangsung.
15. Rasionalitas konsumen kelompok berpenghasilan menengah ke atas harus terus diperbaiki agar tidak dipengaruhi oleh berbagai promosi yang kurang relevan dengan manfaat dan kegunaan susu sebagai sumber nutrisi, sehingga partisipasi konsumsi dan besaran konsumsi dapat merefleksikan asupan nutrisi yang sebenarnya.
16. Untuk menyambut berlakunya MEA 2015, perlu membuat semua komponen yang terlibat dalam produksi susu dalam negeri siap dalam segala aspek agar dapat berdaya saing dengan kemungkinan intervensi pasar susu dari negara lain.

Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam upaya pengembangan koperasi susu melalui pendidikan dan latihan, pemberdayaan koperasi susu untuk pengembangan usaha peternakan, mendorong adanya pabrik susu yang dikelola koperasi, menyediakan bantuan dana dan bantuan sosial.

17. Cetak Biru Persusuan Indonesia 2025 perlu segera disosialisasikan meskipun masih perlu ditinjau ulang di kemudian hari agar pelaku usaha dan pihak produsen serta konsumen susu dan pihak lain yang berkaitan dapat segera memulai langkah dan partisipasinya dalam pengembangan persusuan di Indonesia.
18. Menyongsong diberlakukannya MEA 2015, usaha persusuan di Indonesia perlu mempersiapkan diri dalam hal manajemen usaha ternak yang baik (*good farming practice*), jaminan harga yang atraktif untuk keberlangsungan usaha ternak sapi perah, kemitraan yang saling menguntungkan antara peternak (koperasi) dengan IPS, meningkatkan daya saing terhadap kemungkinan masuknya produk susu dari negara lain atau apabila memungkinkan meningkatkan peluang pengembangan pasar produk susu ke negara lain.
19. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memberikan dukungan untuk pengembangan persusuan melalui fasilitasi teknologi, dana dan membuka peluang pasar melalui gerakan minum susu bagi anak-anak sekolah dalam upaya meningkatkan kecerdasan bangsa sesuai dengan UUD 1945.

**MATRIKS RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN STRUKTUR  
KEMITRAAN INDUSTRI SUSU USAHA UKM MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

<b>Rencana Tindak</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Sasaran Waktu</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>I. UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI SUSU DALAM NEGERI</b>			
1. Inventarisasi produsen susu di Jawa dan Luar Jawa	Potensi pengembangan sapi perah (ternak perah) untuk meningkatkan produksi SSDN	2013–2014	GKSI, Ditjen PKH
2. Peningkatan <i>farm-gate price</i> susu segar peternakan rakyat	Penerimaan peternak rakyat dapat menjamin kelangsungan usaha produksi susu dengan kualitas lebih baik	2013–2014	Pusat-pusat Penelitian, GKSI, Ditjen UKM
3. Teknologi peningkatan diversifikasi produk susu	Peningkatan produk olahan susu dengan nilai tambah ekonomi	2013–2014	Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi, IPS, Ditjen Perindustrian
4. Jaminan kuantitas dan kualitas pakan sumber daya lokal	Terjaminnya ketersediaan pakan sepanjang tahun dengan kualitas pakan yang terstandarisasi	2013–2015	GKSI Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi, Ditjen PKH
5. Intensifikasi penerapan <i>good farming practice</i>	Peningkatan pengetahuan peternak dalam usaha sapi perah yang baik dan benar	2013–2015	GKSI, Ditjen PKH
<b>II. ANALISIS DAYA SAING SUSU SEGAR DALAM NEGERI</b>			
1. Pemantauan tingkat konsumsi susu oleh masyarakat	Informasi peluang pengembangan produksi susu dari peternakan rakyat	2013–2014	Ditjen P2HP, Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi
2. Ketersediaan dan kepastian hukum dalam penggunaan kawasan untuk usaha sapi perah	Terjaminnya usaha sapi perah yang berkelanjutan	2013–2015	Pemprov, Pemkab, BUMN/D, Swasta Kementerian terkait



2. Fasilitasi model <i>cluster</i> pengembangan usaha sapi perah pola 100-1000-10000	Terbangunnya industri persusuan dalam suatu kawasan dengan 100 ha lahan, 1000 ekor sapi untuk 100 peternak dengan produksi 10000 liter susu per hari	2009–2015	Pemprov, Pemkab, Swasta, GKSI
3. Kajian regular untuk konsumsi susu segar masyarakat terutama anak-anak usia sekolah	Perubahan pola konsumsi susu masyarakat usia sekolah dasar dan menengah	2013–2015	Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi, GKSI
<b>III. KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN</b>			
1. Pengembangan kemitraan pemasaran susu segar skala UKM	Rekomendasi pola kemitraan saling menguntungkan dengan harga jual yang atraktif	2013–2015	Ditjen UKM, Ditjen PKH, Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi
2. Penambahan saluran pemasaran di sentra-sentra produksi susu.	Terbangunnya industri pengolahan susu skala UKM yang efisien dan efektif karena dekat dengan wilayah produsen	2013–2015	GKSI, Ditjen Perindustrian, UKM
3. Peningkatan <i>scaling up</i> program minum susu untuk anak-anak sekolah	Meningkatnya konsumsi susu segar anak-anak sekolah dasar dan menengah	2013–2014	Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi, Perusahaan Swasta, BUMN/D
4. Sosialisasi program menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015	Persamaan persepsi masyarakat persusuan tentang MEA 2015	2013–2014	Ditjen PKH, Ditjen P2HP, Ditjen UKM, Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi
5. Dukungan dan rekomendasi dalam pengembangan populasi sapi perah ke luar Jawa	Swasta/BUMN yang tertarik untuk mengembangkan usaha ternak sapi perah	2013–2015	Perbankan, Pemprov, Pemkab

## DAFTAR BACAAN

- ASEAN Economic Community Blueprint. 2008. <http://www.asean.org>.
- Cimory. 2012. Kiat membangun kemitraan dengan peternak dalam menghasilkan produk berkualitas dan pendapatan peternak yang atraktif. Makalah disampaikan dalam *Scooping Study: Membangun Landasan Kemitraan Usaha Susu Segar Dalam Negeri antara Peternak dan UKM*. Bogor, 5 – 6 Desember 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Darmawan, T. 2013. Strategi pemasaran dan daya saing produk susu segar dalam negeri menuju AEC 2015. Makalah disampaikan dalam *Roundtable Discussion: Pengembangan Struktur Kemitraan Industri Susu Usaha Kecil Menengah Menuju Masyarakat ASEAN 2015*. Bogor, 2 Mei 2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Ditjen Peternakan. 2010. Statistik Peternakan 2010. Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2012. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- GKSI. 2013. Membangun kemitraan peternak sapi perah dengan industri pengolahan susu. Makalah disampaikan dalam *Roundtable Discussion: Pengembangan Struktur Kemitraan Industri Susu Usaha Kecil Menengah Menuju Masyarakat ASEAN 2015*. Bogor, 2 Mei 2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.

- Kemenko Bidang Perekonomian. 2013. Arah dan strategi kebijakan persusuan Indonesia 2025. Makalah disampaikan dalam *Roundtable Discussion: Pengembangan Struktur Kemitraan Industri Susu Usaha Kecil Menengah Menuju Masyarakat ASEAN 2015*. Bogor, 2 Mei 2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Priyanti, A., S. Nurtini dan A. Firman. 2009. Analisis ekonomi dan aspek sosial usaha sapi perah. Profil Usaha Peternakan Sapi Perah di Indonesia. Eds. Santosa, K.A., K. Diwyanto dan T. Toharmat. LIPI Press, Jakarta.
- Puslitbang Peternakan. 2012. Membangun landasan kemitraan usaha susu segar dalam negeri antara peternak dan UKM. *Scooping study*, Bogor 5-6 Desember 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor: 010/Kpts/OT.160/I.5/I/2013 Tanggal 2 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, maka Tim dimaksud adalah:

### **TIM KAJIAN ANTISIPATIF DAN RESPONSIF KEBIJAKAN STRATEGIS PETERNAKAN DAN VETERINER**

1. Prof (R) Dr. Syamsul Bahri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Prof (R) Dr. Kusuma Diwyanto, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
4. Prof (R) Dr. Subandriyo, Balai Penelitian Ternak
5. Prof (R) Dr. Budi Haryanto, Balai Penelitian Ternak
6. Prof (R) Dr. Ismeth Inounu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
7. Dr. Agus Wiyono, Balai Besar Penelitian Veteriner
8. Dr. Suhardono, Balai Besar Penelitian Veteriner
9. Dr. Atien Priyanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan



## **TIM PERUMUS**

1. Prof (R) Dr. Sjamsul Bahri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Prof (R) Dr. Budi Haryanto, Balai Penelitian Ternak
4. Prof (R) Dr. Subandriyo, Balai Penelitian Ternak
5. Dr. Atien Priyanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

# **LAMPIRAN**

## **ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN PERSUSUAN INDONESIA 2025**

*Asisten Deputi Kelautan, Perikanan dan Peternakan  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*

### **RINGKASAN**

Dokumen Cetak Biru Persusuan Indonesia 2025 disusun sebagai dasar koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang persusuan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan oleh masing-masing kementerian teknis (Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan) serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para peternak, pelaku usaha, lembaga keuangan, asosiasi dan organisasi profesi bidang peternakan dan veteriner. Selain itu untuk meningkatkan ketersediaan susu nasional dan konsumsi susu segar dalam negeri melalui pengembangan ternak perah yang meliputi sapi perah FH dan non FH, kerbau, kambing dan kuda.

Penyusunan dokumen Cetak Biru bertujuan sebagai dasar koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang persusuan untuk: (i) Mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang lebih terfokus dan terpadu lintas sektoral dari hulu sampai hilir, (ii) Memberikan target dan tahapan pencapaian yang komprehensif sebagai indikator keberhasilan, (iii) Memberikan acuan penyediaan input yang diperlukan dan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan, (iv) Memberikan kepastian usaha kepada peternak dalam mengelola usaha ternak perah yang

meliputi ternak sapi perah FH dan non FH serta non sapi perah (kerbau, kambing dan kuda) yang berkelanjutan dan terintegrasi, dan (v) Memberikan kepatian usaha bagi industri pengolahan susu dalam mengembangkan usahanya dengan bahan baku lokal yang berkelanjutan.

Sasaran disusunnya Cetak Biru Persusuan Indonesia 2025 adalah meningkatnya konsumsi susu segar masyarakat, produksi susu segar nasional serta populasi dan produktivitas ternak perah nasional, tercapainya swasembada persusuan nasional, pendapatan dan kesejahteraan peternak, dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Tahapan Cetak Biru Persusuan Indonesia 2025 adalah: Fase I yang merupakan tahapan persiapan dan pemantapan (2013–2014), Fase II adalah tahapan pengembangan persusuan nasional maju (2015–2020), dan Fase III sebagai tahapan persusuan nasional tangguh dan berdaulat (2020–2025). Keberadaan Cetak Biru Persusuan ini bukan hanya rencana dari pemerintah, tetapi juga merupakan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah maupun pelaku usaha. Oleh sebab itu, dalam implementasinya memerlukan dukungan penuh dari pimpinan pemerintahan dan pelaku usaha, membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh serta didukung oleh sumber daya yang memadai.



# **PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENGAKSELERASI PENINGKATAN PRODUKSI SUSU MENUJU KOMUNITAS EKONOMI ASEAN 2015**

*Asisten Deputi Urusan Perikanan dan Peternakan  
Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil-Menengah*

## **RINGKASAN**

Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional yang ditengarai sebagai mayoritas jumlah pelaku usaha (55,2 juta unit usaha  $\approx$  99,9%), penyerap tenaga kerja terbanyak (101,7 juta pekerja  $\approx$  97,24%), kontribusi terhadap PDB sebesar Rp. 3,4 Trilyun ( $\approx$  57,1%), dan memiliki nilai investasi sebesar Rp. 927 Trilyun (44,89%) pada tahun 2012. Pola pembiayaan untuk usaha mikro meliputi program pemberdayaan masyarakat (PNPM), program pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan program lembaga pembiayaan dana bergulir (LPDB) K-UMKM. Hal tersebut untuk usaha kecil dan menengah adalah program yang sama dengan usaha mikro ditambah dengan perbankan, sedangkan untuk usaha besar meliputi pasar modal, perbankan dan sumber lainnya. Sumber pembiayaan K-UMKM dapat berasal dari pemerintah, non pemerintah serta gabungan dari pemerintah dan non pemerintah. Sumber pemerintah terdiri dari dana APBN, APBD dan SUP-005. Sumber non pemerintah dapat berasal dari bank maupun non bank dengan berbagai jenis kredit, sedangkan sumber gabungan dari pemerintah dan non pemerintah dapat berasal dari laba BUMN. Target atau sasaran dari sumber-sumber pembiayaan ini adalah K-UMKM baik yang belum *bankable* maupun yang *bankable*.

Kebijakan pengembangan koperasi susu meliputi: (i) Pembinaan kelembagaan koperasi, antara lain melalui pendidikan dan

pelatihan, (ii) Pemberdayaan koperasi dalam pengembangan usaha peternakan, serta (iii) pembangunan pabrik susu yang dikelola koperasi dan penambahan populasi sapi perah (baik lokal maupun impor) melalui program bantuan perkuatan dana dan bantuan sosial. Salah satu elemen dalam *Blue Print ASEAN Community* terkait dalam hal ini adalah mengakselerasi peran koperasi maupun UKM dalam usaha pertanian. Bagi produk susu, Thailand merupakan saingan utama bagi Indonesia, dimana Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia, alam dan iklim yang kondusif untuk mengembangkan usaha sapi perah. Langkah-langkah strategis yang perlu dipersiapkan adalah: (i) Penataan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi agar semakin efisien dan profesional, (ii) Memperkuat koperasi sekunder agar mampu memproduksi berbagai produk susu yang marketable ke negara-negara ASEAN, (iii) Memantapkan dan mengembangkan pola kemitraan dengan mengoptimalkan pemanfaatan *corporate social responsibility*, dan (iv) Membangun networking koperasi susu baik secara *intra industry* maupun *inter industry*.

## **MEMBANGUN KEMITRAAN PETERNAK SAPI PERAH DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU**

*Gabungan Koperasi Susu Indonesia*

### **RINGKASAN**

Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) merupakan gabungan dari anggota GKSI Jawa Barat, GKSI Jawa Tengah dan GKSI Jawa Timur. GKSI ini membawahi sekitar 1500 kelompok peternak sapi perah yang beranggotakan sejumlah 127 peternak sebagai anggota koperasi primer. Jumlah koperasi primer anggota GKSI mencapai 95 buah, tersebar masing-masing di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sejumlah 22 koperasi, 23 koperasi dan 50 koperasi. Populasi sapi perah milik anggota mencapai 375 ribu ekor dengan produksi susu per hari berkisar antara 1,5 – 1,6 juta liter dan baru mencukupi 18% kebutuhan susu di dalam negeri. Terdapat potensi bibit sejumlah 70 ribu ekor setiap tahun dari sekitar 140 ribu pedet yang lahir. Asset yang dimiliki peternak dan koperasi meliputi *cooling unit* (351 buah), truk sebagai transfer tank (375 buah), kendaraan daerah dan pemasaran (450 unit), pabrik pakan konsentrat (85 buah), dan 3 buah pabrik susu, masing-masing di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pabrik susu milik GKSI memiliki kapasitas produksi berturut-turut sebesar 100 ton/hari, 200 ton/hari dan 250 ton/hari untuk pabrik di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (GKSI, 2013). Oleh karenanya, GKSI merupakan kelembagaan yang sangat berperan dalam pengembangan agribisnis sapi perah di Indonesia dengan salah satu fungsinya adalah menegosiasikan harga beli susu segar dengan IPS.

Industri pengolahan susu (IPS) merupakan pasar susu terbesar (90%) dari peternakan sapi perah rakyat, dimana penentuan harga dilakukan secara *unfairness*, sehingga harga susu yang

diterima peternak adalah yang paling murah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Rantai dingin susu diawali dengan pengumpulan susu di tingkat peternak hingga sampai ke tempat penampungan susu di koperasi. Selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan dan pengambilan sampel susu oleh petugas terlatih. Susu yang baik dibawa ke tempat pendinginan susu dengan suhu mencapai 4°C dan dipasarkan menuju IPS. GKS berupaya keras untuk menjalankan pabrik susu yang dikelolanya guna menyongsong masa depan peternakan sapi perah rakyat yang lebih baik. Diharapkan pemerintah lebih proaktif mendukung perkembangan persusuan nasional dan menjamin terjadinya sinergisme antara kementerian terkait sampai ke daerah. Perlunya kebijakan yang operasional dalam hal pemanfaatan lahan, pakan, perbibitan dan akses terhadap kredit dalam pengembangan persusuan di Indonesia.



# **PENINGKATAN KUALITAS SUSU SEGAR UNTUK MENGHASILKAN PRODUK BERDAYASAING DAN PENDAPATAN YANG ATRAKTIF**

*Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak, Cikole – Lembang*

## **RINGKASAN**

Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak (BPTSP – HMT) di Cikole-Lembang, Jawa Barat memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk menyediakan bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar sapi perah, serta meningkatkan kualitas produk hasil ternak. Hal ini didukung oleh sekitar 37 Ha lahan untuk usaha pengembangan dan *rearing* sapi perah, masing-masing di Cikole dan Kabupaten Subang, dimana sejumlah 16 Ha merupakan kebun rumput. Jumlah sapi perah mencapai 208 ekor, berturut-turut adalah 35 ekor, 108 ekor dan 65 ekor untuk pedet, muda dan dewasa. Produksi susu yang dihasilkan rata-rata adalah 15–20 l/hari, dimana sebagian besar (61%) dijual dalam bentuk susu segar, dan sisanya adalah untuk konsumsi pedet (30%), dijual sebagai susu pasteurisasi (8%), serta promosi, sosial dan pengujian (1%). Kualitas susu yang dihasilkan telah memenuhi acuan SNI 3141.1:2011 untuk susu segar, dimana kadar lemak sebesar 3,3%; kadar protein 2,9% dan kandungan bakteri dibawah  $1 \times 10^6$  CFU/ml. Pemasaran produk susu dalam bentuk susu segar dan susu pasteurisasi dengan kemasan plastik, botol dan *cup*. Harga susu segar adalah Rp. 4.000/l, susu pasteurisasi mencapai Rp. 8.000/l, susu pasteurisasi dalam kemasan (200 ml) adalah Rp. 2.000/buah, dan susu pasteurisasi dalam kemasan botol (500 ml) mencapai Rp. 6.500/botol. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas susu adalah kualitas pakan,

kebersihan kandang dan ternak, teknik pemerahan, serta perlakuan pasca pemerahan.

BPTSP–HMT adalah unit pelaksana teknis dibawah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, sehingga bukan merupakan unit usaha dengan orientasi keuntungan. BPTSP–HMT lebih berperan sebagai tempat rujukan teknologi pengembangan sapi perah dan tempat sosialisasi untuk minum susu segar, disamping berfungsi untuk menjalin kemitraan sengan pelaku usaha baik dalam hal usaha budidaya ternak sapi perah maupun pengolahan hasil produk susu segar.

# **STRATEGI PEMASARAN DAN DAYA SAING PRODUK SUSU SEGAR DALAM NEGERI MENUJU AEC 2015**

**Ir. Thomas Darmawan**

*Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman dan Tembakau,  
KADIN Indonesia*

## **RINGKASAN**

Menurut McKinsey Global Institute saat ini Indonesia merupakan negara ke-16 dengan pertumbuhan ekonomi terbesar, kelas ekonomi menengah-atas mencapai 45 juta orang, 53% penduduknya tinggal di kota besar yang menyumbang terhadap 74% PDB, tenaga kerja terampil sejumlah 55 juta orang, dan sekitar USD 0,5 Trilyun peluang pasar dari sektor jasa, pertanian dan perikanan, sumber daya lahan dan pendidikan. Hal ini diprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara ke-7 terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk Indonesia pada tahun tersebut akan mencapai lebih dari 300 juta orang, namun masih ada sekitar 165 juta orang dengan pendapatan menengah-bawah. Hampir 50% penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta ( $\approx$  57 juta rumah tangga) memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 850 ribu – Rp. 2,3 juta per rumah tangga. Sekitar 41% berada dibawah Rp. 850 ribu/bulan dan sejumlah 12% berada diatas Rp. 2,3 juta/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penduduk kelas ekonomi menengah-atas cukup besar di Indonesia, dan sudah sepantasnya memberikan peluang usaha yang sangat prospektif, termasuk industri pengolahan susu berbasis susu segar. Konsumsi susu nasional diprediksi meningkat sebesar 8% pada tahun 2013, dimana hal ini dipicu oleh kenaikan jumlah penduduk dan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang manfaat susu bagi kesehatan. Variasi minuman susu oleh

produsen dalam berbagai bentuk seperti susu siap minum juga turut mendorong kenaikan konsumsi susu.

Membangun era baru menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sudah disepakati dalam kesepakatan *Blue Print ASEAN Community* yang berlandaskan pada 4 azas utama, yakni: (i) Pasar tunggal dan basis produksi regional, (ii) Kawasan yang memiliki daya saing tinggi, (iii) Kesamaan dalam pembangunan ekonomi yang merata, dan (iv) Integrasi perekonomian kawasan dengan perekonomian global. Hampir 600 juta penduduk ASEAN sebagai pasar dunia, suatu potensial pasar yang sangat besar. Lebih dari 30% merupakan penduduk dengan pendapatan kelas ekonomi menengah atas dengan berbagai perbedaan pangsa pasar dan kultur sosial budaya. Negara-negara di wilayah ASEAN merupakan net importir pangan seperti terigu, daging, ikan, tepung ikan, buah, kapas, dan produk susu. Namun di sisi lain, wilayah ini merupakan eksportir global untuk produk-produk sawit, kopi, udang, coklat, karet, nanas, pisang dan produk pertambangan.

Industri pengolahan susu menciptakan produk-produk yang bermanfaat dan aman bagi kesehatan, serta sesuai dengan kebutuhan dan daya beli konsumen. Dalam hal ini produk yang dihasilkan berdasarkan petunjuk yang jelas serta pedoman-pedoman melalui peraturan dan petunjuk pelaksanaannya, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan standarisasi produk. Industri ini juga menggunakan bahan kemasan yang aman dan sesuai dengan tujuan, fungsi, daya beli dan segmen pasar yang ada dalam mengolah hasil peternakan dalam negeri maupun impor menjadi produk berkualitas. Hasil estimasi menunjukkan bahwa harga per gram protein susu segar adalah Rp. 285, relatif lebih murah dibandingkan dengan produk udang besar dan daging sapi. Hal tersebut yang paling murah adalah tahu dan tempe yang masing-masing bernilai Rp. 140.



Persaingan produsen-produsen pengolah susu diperkirakan akan semakin ketat seiring dengan investasi yang dilakukan untuk menambah kapasitas produksi maupun membangun pabrik baru. Investasi yang dilakukan ditujukan untuk memenuhi peningkatan permintaan di dalam negeri. Industri susu skala UKM harus terus didorong untuk mencapai kondisi yang diharapkan secara bertahap melalui: (i) Pelatihan dan penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan, (ii) Penerapan cara produksi susu yang baik, (iii) Penerapan manajemen keamanan pangan berdasarkan prinsip HACCP, dan (iv) Pelaksanaan sertifikasi manajemen mutu internasional (ISO 9000, 22000, SQF). Prinsip-prinsip *good farming practices, good handling practices, good distribution practices, good retailing practices, dan good consumption practices* harus diterapkan dengan baik dan benar, sebagai satu kesatuan sistem manajemen *from farm to table*. UKM dapat memanfaatkan kerjasama produksi dalam bentuk *contract manufacturing* dengan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh seperti jaminan kebutuhan investasi, kapasitas produksi, biaya promosi dan pemasaran yang lebih efisien. Agar peternak dapat mandiri dan tidak tergantung kepada IPS, dianjurkan beberapa koperasi bergabung untuk dapat membuat pabrik pengolahan susu skala menengah berbasis susu segar di sentra-sentra produksi susu.

ISBN 978-602-8475-73-0

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan**

Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151

Telp. (0251) 8322185, 8322138

Fax. (0251) 8328382, 8380588

E-mail: [criansci@indo.net.id](mailto:criansci@indo.net.id)